

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik menurut Weber adalah organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Weber juga berpendapat, “istilah parpol” akan digunakan untuk menunjukkan suatu jenis hubungan sosial yang asosiatif yang keanggotaannya didasarkan pada pengrekrutan yang secara formal bebas. Tujuan aktivitasnya adalah untuk menanamkan suatu kekuatan dalam suatu kelompok berbadan hukum (*corporate*) bagi pemimpin-pemimpinnya guna mendapatkan keuntungan ideal atau berupa realisasi kebijakan objektif tertentu atau tercapainya keuntungan pribadi atau keduanya.¹

Partai politik bisa dikatakan sebagai pilarnya demokrasi, baiknya partai politik maka akan baik pulalah proses demokrasi yang diselenggarakan oleh sebuah Negara, dan begitu pula sebaliknya bila partai politik bermasalah maka demokrasi akan pincang proses politiknya. Karena dalam hal ini sebagai pilarnya demokrasi, partai politik memainkan peranan penting sebagai penghubung antara pemerintahan Negara dengan warga negaranya, karena dalam hal ini partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara.

Dalam sistem politik di Indonesia sudah menempatkan partai politik menjadi pilar utama penyelenggaraan demokrasi di Indonesia adalah tidak terdapat demokrasi tanpa partai politik. Oleh karena itu, penting sebuah peraturan perundang-undangan yang berhubungan partai politik yang bertujuan agar bisa mengklaim pertumbuhan partai yang baik, sehat dan profesional. Partai politik yang biasanya cenderung menunjukkan tipe yang bersifat kharismatik dan klientelistik ketimbang partai yang bernuansa pragmatik misalnya yang dilakukan

¹Rika Ramadhani, Partai Politik dan Demokrasi (*Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*), Vol.16 No.3, September 2018, h.251.

partai politik dalam saat berkampanye selalu mengatasnamakan masyarakat namun fenomena yang terjadi justru mereka memperjuangkan kepentingan gerombolan-gerombolan sendiri.²

Seiring berjalannya waktu semakin banyak partai yang turut hadir dalam pergulatan dunia politik seperti partai ummat salah satunya. Partai ummat merupakan salah satu partai pendatang baru pada Indonesia. Meski usianya masih belia, partai ini telah relative dikenal pada kancah perpolitikan tanah air. Ditubuh partai tersebut, masih ada nama-nama akbar misalnya mantan ketua majelis permusyawaratan rakyat (MPR) Amien Rais sampai mantan menteri kehutanan MS kaban. Sejarah berdirinya partai ummat lahir berdasarkan kerekatan pada tubuh Partai Amanat Nasional (PAN), partai yang using menaungi dan membesarkan nama amien rais. Dalam kongres V PAN yang digelar february 2020, Zulkifli Hasan ditetapkan menjadi ketua umum PAN. Amien Rais yang mendukung Mulfachri Harahap pada pemilihan ketum PAN menganggap, Zulkifli galat lantaran berencana merapat ke koalisi pemerintah. Atas perbedaan pandangan tersebut, amien Rais menetapkan hengkang berdasarkan PAN beserta anaknya, Hanafi Rais. Dari situlah, Amien Rais berkeinginan membangun partai baru menggunakan semboyan “Lawan kezaliman dan tegakkan keadilan” menggunakan asas rahmatan lil alamin.³

Pada 1 Oktober 2020 Amien Rais mengumumkan partai baru yang didirikan bernama Partai ummat. Partai itu dideklarasikan secara resmi enam bulan setelahnya atau 29 April 2022 logo perisai tauhid logo partai ummat menyerupai menggunakan latar hitam dan garis tapi berwarna emas. Di Tengahnya masih ada gambar bintang rona emas pula.⁴

²Zainal Abidin Saleh, Demokrasi Dan Partai Politik, *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 5 No. 1, Maret, 2008, h.73.

³Widya Wardani, Galuh (1 Mei 2021). Prabawati, Garuda, ed. *Daftar Tokoh PAN Pindah ke Partai Umat, Dari Fauzi Kadir, Nazarudin, Buhari Kahar, Hingga Sugeng*". Tribun News. Diakses tanggal 25 Mei 2022.

⁴Aditya, Nicholas Ryan (30 April 2021). *Berdirinya Partai Ummat, Dipimpin oleh Menantu Amien Rais dan Ditargetkan Berkontestasi di Pemilu 2024*". KOMPAS.COM. Diakses tanggal 25 Mei 2022.

Begitu pentingnya partai politik, sehingga diasumsikan bahwa tidak terdapat demokrasi tanpa partai politik, pernyataan ini relatif sering dikemukakan. Ini didasari oleh liputan bahwa institusi partai politik merupakan keliru satu pilar krusial bangunan sistem demokrasi selain institusi pemilu, eksekutif, yudikatif, dan forum pers yang bebas. Meski begitu pentingnya kedudukan partai politik dalam sistem demokrasi, namun tanpa partai politik yang bertenaga maka tidak akan terdapat demokrasi bertenaga.

Bagi Negara yang menganut konsep demokrasi, partai politik adalah salah satu pilar yang sangat penting untuk mewujudkan konsep demokrasi itu sendiri yang syarat akan kemerdekaan, kebebasan, kebijaksanaan, keadilan, keseimbangan, dan lain sebagainya. Hal inilah yang akan menjadi pijakan bagi Negara untuk menertibkan rakyatnya menuju Negara yang benar-benar merdeka dan tanpa ada kediktatoran. Karna pada hakikatnya partai politik harus bekerja keras dan selalu mementingkan kesejahteraan rakyat, karena rakyatlah yang menentukan pilihan. Partai politik harus memiliki komitmen dan tetap menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan garis dan haluan partai, sebab jika partai tidak menjalankan peran dan fungsi dengan baik maka partai bersiaplah untuk ditinggalkan pendukung ataupun konstituennya.

Sejarah politik Islam dalam Islam dalam pembahasannya tentunya harus merujuk pada teks-teks Al-Qur'an (*nash*) karena didalamnya terdapat sejumlah unsur-unsur politik berupa, keadilan, musyawarah, toleransi, hak-hak dan kewajiban, *amar ma'rufi*, dan *nahu munkar*, kejujuran, serta penegakkan hukum. Selain itu, praktik politik Rasulullah SAW dapat menjadi *sunnah* dalam penyelenggaraan pemerintahan islam.⁵

Indonesia sebagai sebuah negara Islam terbesar di dunia belum memberikan bagi berjayanya partai politik islam di Indonesia, banyak berdirinya partai politik yang beraskan islam di Indonesia merupakan suatu perkembangan yang cukup baik, namun dengan kecilnya perolehan suara partai poltik islam dalam setia pemilu di Indonesia menjadi sebuah persoalan, mengapa hal ini dapat

⁵Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung: CV Pustaka, 2012), h.15.

terjadi. Walaupun dengan perolehan suara yang sangat kecil dibandingkan dengan perolehan suara partai yang berideologikan nasionalisme, partai Islam memberikan pengaruh dan memiliki peranan tersendiri dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Pemilu pertama pada rezim reformasi dilakukan pada 1999 dimana perolehan suara partai Islam sangatlah kecil dibandingkan dengan perolehan suara partai politik yang tidak berdasarkan Islam. PPP hanya memperoleh 58 kursi di DPR yaitu 12,6 % dari 462 kursi, PBB 2 % (13 kursi), PK 1,5 % (7 kursi), PNU 1% (5 kursi) serta PKU, PSII dan partai Masyumi hanya memperoleh 1 kursi di DPR. Sedangkan perolehan suara partai yang berbasis Islam juga sangat kecil, yaitu PKB 11 % (51 kursi) dan PAN 7,36 % (34 kursi), sehingga pada pemilu 1999 total perolehan kursi partai Islam adalah 37 % (171 kursi).

Perolehan suara partai politik Islam di Indonesia yang semakin merosot menunjukkan bahwa partai politik Islam tidak terlalu mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia, namun perkembangan partai politik Islam yang terus terbentuk dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa partai politik Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Walaupun jumlah total perolehan suara partai politik Islam selalu menurun dibandingkan dengan tahun 1955 yaitu sebesar 43,7% turun pada pemilu 1999 yaitu 36,8 % dan pada pemilu 2008 naik menjadi 38,1%.⁶

Partai politik yang berbasis Islam yang ada di Indonesia kini telah memiliki dewan pengurus wilayah yang ada di provinsi maupun daerah serta cabang di setiap daerah. Partai politik yang memiliki ideologi Islam yang sering disebut sebagai partai Islam diharapkan mampu melakukan pengawasan terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, partai politik Islam sebagai salah satu sarana yang berperan untuk mewujudkan pemerintahan Ideal, salah satunya adalah partai yang belum lama didirikan ialah Partai Ummat, sehingga penulis mengangkat

⁶Fadhil Ilhamsyah, Peranan Partai Politik Islam terhadap Sistem Pemerintahan di Indonesia, *Jurnal Community*, Vol.5 No.1, April 2019, h.45.

sebuah judul “**STRATEGI POLITIK PARTAI UMMAT DALAM AGEN SUKSESI PEMILIHAN UMUM**”. Berdasarkan latar belakang diatas penulis memuat suatu permasalahan bagaimana strategi partai baru yang berbasis Islam dapat menarik simpati masyarakat Indonesia khususnya Kota Medan sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera dan pemerintahan yang baik.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal berisi tentang pertanyaan singkat dari latar belakang masalah sehingga menjadi landasan yang akan diteliti. Berdasarkan pemahaman diatas peneliti membuat rumusan masalah : “Bagaimana strategi partai ummat menuju Pemilihan Umum 2024?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini merupakan menjadi berikut: “Untuk mengetahui dan memahami strategi partai ummat menuju Pemilihan Umum 2024.”

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sehingga kegunaan teoritis yang dijadikan rujukan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana Strategi Politik dalam suksesi Pemilihan Umum (Studi Terhadap Partai Ummat di Kota Medan), kemudian juga diharapkan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dalam kehidupan bermasyarakat mengenai Strategi Politik Partai Ummat menuju Pemilihan Umum 2024.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian proposal skripsi ini adalah sebagai sumber informasi dan perkembangan bagi pemerintah dan pelaku politik wilayah Kota Medan mengenai Strategi Politik Partai Ummat menuju Pemilihan Umum 2024.

E. Batasan Istilah

1. Strategi Politik merupakan strategi atau Teknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. Strategi politik sangat penting untuk sebuah partai politik, tanpa adanya strategi politik, perubahan jangka Panjang sama sekali tidak dapat diwujudkan. Untuk mencapai cita-cita politik yang dimaksud, Peter Schroder membagi strategi politik kedalam dua bagian; strategi ofensif (menyerang) dan juga strategi defensive (bertahan).⁷
2. Pemilihan Umum merupakan wujud sistem politik yang demokratis serta ajang bagi masyarakat untuk menentukan wakil-wakil di pemerintahan yang sesuai dengan keinginan dan bisa diharapkan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi mereka. Pemilihan umum tentunya juga bukan hanya ajang demokrasi terhadap pemilihan pemimpin baru akan tetapi juga menjadi wadah bagi partai politik selaku pemain utama dalam proses pemilihan tersebut untuk menyusun kekuatan agar bisa mendudukkan kadernya sebagai pemimpin pada semua tingkatan pemerintahan.
3. Partai Politik sebagai organisasi yang bertujuan untuk memobilisasi individu-individu dalam suatu aksi kolektif untuk melawan kelompok lain, atau melakukan koalisi dengan pihak yang tengah duduk dalam pemerintahan. Aksi kolektif ini perlu mendapat justifikasi dari kepentingan bersama. Partai politik merupakan sekumpulan individu yang secara terstruktur membentuk sebuah lembaga yang bertujuan merebut kekuasaan politik secara sah (institusionalisasi penggunaan hak suara yang berjalan secara teratur). Melalui kekuasaan yang diraihnya, orang-orang yang berada dalam partai politik tersebut, akhirnya bisa menjalankan program-program partai politik. Sama halnya sebuah organisasi pada umumnya, partai politik juga mempunyai asas, tujuan, ideologi, dan misi tertentu yang diterjemahkan ke dalam program-program partai politik

⁷Schroder Peter, *Strategi Politik* (Jakarta: FNS, 2009)

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah tata cara atau usaha peneliti untuk membandingkan penelitian. Di samping itu untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti menggabungkan hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut :

1. Skripsi melalui oleh ISNAINI NURUL FAJRI UIN Raden Intan Lampung, 2018 judul “SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PARTAI POLITIK ISLAM” (Studi Kasus Kelurahan Kopri Jaya, kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung) kesimpulan dari skripsi tersebut adalah Sikap masyarakat kelurahan korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan jumlah sampel 85 responden yang memiliki sikap positif terhadap partai politik Islam sebanyak 41 responden dengan persentase 48% adapun aspek pertimbangan masyarakat Kopri Jaya bersikap positif karena parpol Islam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menggunakan platform AL-Quran.⁸
2. Jurnal oleh SYAHRUL IBAD DAN MUSDALIFAH, Universitas Ibrahimy Situbondo, Judul PARTAI POLITIK: TINJAUAN STRATEGI DALAM MERAIH DUKUNGAN MASSA, dalam jurnal ini berisi tentang strategi suatu partai politik yang dilakukan partai adalah sebuah proses atau rentetan dari perjuangan partai politik untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi partai politik. Dalam hal itu, partai politik harus bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat di tengah masyarakat yang krisis akan kepercayaan kepada partai politik.⁹

⁸Isnaini Nurul Fajri, “*Skripsi (Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam)*”, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018),Hal. 70.

⁹Syahrul Ibad, Partai Politik: Tinjauan Strategi dalam Meraih Dukungan Massa, *Publik Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 8 (2), Desember 2019

3. Jurnal oleh TITO HANDOKO, Universitas Riau, Judul STRATEGI POLITIK: PREFERENSI PARTAI POLITIK MENGHADAPI PEMILU DI ARAS LOKAL, dalam jurnal ini berisi tentang Partai politik yang hadir sebagai perwakilan kepentingan masyarakat memainkan peranan yang sangat strategis dalam pembuatan kebijakan Negara. Kehadiran partai politik hendaknya jangan hanya menjadi pelengkap dari sistem politik demokrasi yang dianut oleh suatu negara, oleh sebab itu partai politik harus berjuang keras melalui kader-kadernya untuk memperoleh simpati masyarakat hingga akhirnya mampu mewakili masyarakat baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.
4. Jurnal oleh AFRIZA, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Judul EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM PERSEPSI PUBLIK, Jurnal ini membahas tentang Fakta dan persepsi publik terhadap partai politik adalah rakyat merasa tidak dekat dengan partai politik. Ini terjadi dikarenakan institusionalisasi partai politik yang lemah, sehingga pola rekrutmen partai politik dilakukan dengan tidak transparan dan transaksional hanya untuk mengejar kepentingan elektoral semata, hal ini menyebabkan risiko terjadinya krisis kepercayaan rakyat atas partai politik disebabkan oleh jenjang kader yang tidak terencana dengan baik, sehingga banyaknya kader partai politik terjerat kasus korupsi; dan sejumlah pelanggaran etika yang dilakukan kader partai politik. Di sisi lain, pengelolaan institusional kepartaian yang lemah menyebabkan terjadi lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.¹⁰

¹⁰Efriza, Eksistensi Partai Politik dalam Persepsi Publik, *Jurnal Politica*, Vol. 1, 2019

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah serta dapat gambaran umum dalam melakukan serta memahami penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan,

BAB II : KAJIAN TEORI, berisi tentang eksistensi partai ummat terhadap pergolakan elite politik di Kota Medan, meliputi Pengertian eksistensi, pengertian partai ummat, Teori pergolakan, dan pengertian elit politik.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, berisi tentang sejarah lokasi penelitian, letak geografis, kependudukan, dan struktur organisasi lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bagian ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap strategi partai ummat dalam mengambil simpati masyarakat.

BAB V : PENUTUP, pada bagian ini berisi Kesimpulan dan Saran